



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 7773-7781

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Strategi Manajemen Pendidikan di Wilayah Kepulauan: Tantangan, Adaptasi, dan Model Pengelolaan Berkelanjutan

Wa Ode Likmar¹, Eliyanti Agus Mokodompit²

¹Program Studi Kebidanan, Fakultas Vokasi, Universitas Karya Persada Muna

²Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo

¹ likmarwaode@gmail.com, ² eamokodompit66@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing wilayah. Namun, penyelenggaraan pendidikan di wilayah kepulauan menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan wilayah daratan akibat kondisi geografis yang tersebar, keterbatasan akses transportasi, serta keterbatasan sumber daya pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada pemerataan akses, kualitas layanan pendidikan, dan efektivitas manajemen pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama manajemen pendidikan di wilayah kepulauan, strategi adaptasi manajerial yang diterapkan, serta model pengelolaan pendidikan berkelanjutan yang relevan dengan karakteristik wilayah kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review naratif-terstruktur dengan menelaah artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas manajemen pendidikan, pendidikan wilayah kepulauan, dan daerah terpencil. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola tantangan, strategi adaptasi, dan praktik pengelolaan pendidikan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama manajemen pendidikan di wilayah kepulauan meliputi keterbatasan akses fisik, rendahnya stabilitas tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan pendidikan. Adaptasi strategi manajemen dilakukan melalui fleksibilitas perencanaan, penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin strategis, pemanfaatan teknologi digital, serta inovasi berbasis konteks lokal. Lebih lanjut, pengelolaan pendidikan berkelanjutan di wilayah kepulauan menekankan pendekatan manajemen berbasis komunitas, kolaborasi multipihak, dan penguatan kapasitas lokal sebagai fondasi keberlanjutan layanan pendidikan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian manajemen pendidikan berbasis wilayah serta implikasi praktis bagi perumus kebijakan dan pengelola pendidikan di wilayah kepulauan.

Kata kunci: Manajemen Pendidikan, Wilayah Kepulauan, Strategi Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan, Daerah Terpencil

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan daya saing wilayah. Melalui pendidikan yang dikelola secara efektif, suatu wilayah mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan nasional, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang menentukan keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi suatu daerah (Todaro & Smith, 2020).

Namun demikian, penyelenggaraan pendidikan tidak berlangsung dalam kondisi yang homogen. Wilayah kepulauan memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosial yang berbeda secara signifikan dibandingkan wilayah daratan. Kondisi geografis yang tersebar, keterbatasan akses transportasi, serta ketergantungan pada faktor alam seperti cuaca dan kondisi laut menjadi tantangan struktural yang memengaruhi akses, pemerataan, dan mutu pendidikan (UNESCO, 2017). Akibatnya, kesenjangan layanan pendidikan antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya teratasi.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, tantangan pendidikan di wilayah kepulauan menjadi semakin kompleks. Banyak sekolah di pulau-pulau kecil menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas, serta rendahnya dukungan administratif dan supervisi pendidikan (Kemendikbudristek, 2022). Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas proses pembelajaran dan capaian pendidikan peserta didik. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di wilayah kepulauan tidak semata-mata

berkaitan dengan ketersediaan sumber daya fisik, tetapi juga berkaitan erat dengan kualitas tata kelola dan manajemen pendidikan.

Manajemen pendidikan memegang peran kunci dalam memastikan seluruh sumber daya pendidikan—baik manusia, keuangan, maupun sarana—dikelola secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun, pendekatan manajemen pendidikan yang bersifat seragam dan sentralistik sering kali kurang responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal wilayah kepulauan. Kebijakan dan praktik manajemen yang dirancang untuk wilayah daratan tidak selalu relevan atau efektif ketika diterapkan di wilayah dengan kondisi geografis yang terfragmentasi dan sumber daya terbatas (Bush, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen pendidikan yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan. Strategi tersebut harus mampu mengakomodasi keterbatasan geografis, mengoptimalkan potensi sumber daya lokal, memperkuat kepemimpinan sekolah, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (Leithwood et al., 2020). Pendekatan manajemen pendidikan berkelanjutan juga menekankan pentingnya keberlanjutan kelembagaan dan peningkatan kapasitas lokal agar layanan pendidikan dapat terus berjalan secara konsisten meskipun menghadapi berbagai keterbatasan struktural.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai strategi manajemen pendidikan di wilayah kepulauan menjadi sangat relevan dan mendesak. Artikel ini berfokus pada analisis tantangan utama manajemen pendidikan di wilayah kepulauan, bentuk adaptasi strategis yang dilakukan, serta pengembangan model pengelolaan pendidikan berkelanjutan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan serta rekomendasi praktis bagi perumus kebijakan dan pengelola pendidikan di wilayah kepulauan.

2. Kajian Teoritis

2.1 Manajemen Pendidikan

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses sistematis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dalam perspektif manajemen modern, pendidikan dipahami sebagai sistem terbuka yang berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya di sekitarnya (Bush, 2020). Oleh karena itu, manajemen pendidikan tidak hanya berfokus pada pengelolaan internal lembaga pendidikan, tetapi juga pada kemampuan organisasi pendidikan dalam merespons perubahan lingkungan eksternal.

Secara konseptual, manajemen pendidikan berakar pada teori manajemen klasik dan kontemporer. Teori klasik menekankan efisiensi, hierarki, dan pembagian kerja yang jelas, sedangkan teori kontemporer lebih menyoroti fleksibilitas, partisipasi, dan adaptasi terhadap konteks (Robbins & Coulter, 2021). Dalam praktik pendidikan, pendekatan kontemporer menjadi semakin relevan karena lembaga pendidikan dihadapkan pada tantangan kompleks seperti perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, dan keberagaman kebutuhan peserta didik.

Manajemen pendidikan juga berkaitan erat dengan fungsi-fungsi utama manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Perencanaan pendidikan mencakup penetapan visi, misi, tujuan, serta strategi pencapaian tujuan pendidikan. Pengorganisasian berkaitan dengan pengaturan struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi antarunit kerja. Pelaksanaan menitikberatkan pada kepemimpinan dan penggerakan sumber daya manusia, sedangkan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan (Wheelen et al., 2018).

Dalam konteks wilayah dengan karakteristik khusus, seperti wilayah kepulauan, manajemen pendidikan dituntut untuk bersifat fleksibel dan kontekstual. Pendekatan manajemen yang seragam sering kali tidak mampu menjawab kebutuhan lokal yang spesifik. Oleh karena itu, manajemen pendidikan di wilayah kepulauan harus mampu menyesuaikan strategi, struktur, dan proses pengelolaan dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya setempat (Bush & Glover, 2014).

Selain itu, peran kepemimpinan pendidikan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan manajemen pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin strategis yang mampu membangun visi bersama, mengelola perubahan, dan memberdayakan seluruh warga sekolah (Leithwood et al.,

2020). Kepemimpinan yang efektif menjadi semakin penting dalam konteks wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan sumber daya dan dukungan eksternal.

2.2 Karakteristik Wilayah Kepulauan dalam Pendidikan

Wilayah kepulauan memiliki karakteristik geografis yang unik, ditandai oleh keterpisahan antarwilayah, keterbatasan akses transportasi, serta ketergantungan tinggi terhadap kondisi alam. Karakteristik ini berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan, baik dari sisi akses, pemerataan, maupun kualitas layanan pendidikan (UNESCO, 2017).

Keterpisahan geografis menyebabkan banyak sekolah di wilayah kepulauan berada dalam kondisi terisolasi. Akses menuju sekolah sering kali bergantung pada transportasi laut yang tidak selalu tersedia secara reguler. Kondisi ini menyulitkan mobilitas peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, serta menghambat distribusi sarana dan prasarana pendidikan (OECD, 2018). Akibatnya, sekolah-sekolah di wilayah kepulauan cenderung memiliki fasilitas yang lebih terbatas dibandingkan sekolah di wilayah daratan.

Selain aspek geografis, wilayah kepulauan juga ditandai oleh variasi sosial dan budaya yang tinggi. Setiap pulau atau komunitas memiliki nilai, norma, dan tradisi yang berbeda, yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pendidikan. Dalam beberapa kasus, pendidikan formal belum sepenuhnya menjadi prioritas utama masyarakat, terutama ketika kebutuhan ekonomi jangka pendek lebih mendesak (Tilaar, 2019). Kondisi ini menuntut pendekatan pendidikan yang sensitif terhadap budaya lokal.

Karakteristik wilayah kepulauan juga berdampak pada distribusi dan stabilitas tenaga pendidik. Banyak guru enggan ditempatkan di wilayah kepulauan karena keterbatasan fasilitas, minimnya akses layanan publik, dan keterpisahan dari keluarga. Akibatnya, sekolah di wilayah kepulauan sering mengalami kekurangan guru atau tingginya tingkat rotasi tenaga pendidik (Kemendikbudristek, 2022). Kondisi ini berpengaruh pada kontinuitas proses pembelajaran dan kualitas pendidikan.

Dari sisi manajerial, keterbatasan akses juga memengaruhi efektivitas supervisi dan pembinaan pendidikan. Pengawas sekolah dan pejabat pendidikan daerah menghadapi kesulitan dalam melakukan supervisi rutin karena kendala jarak dan biaya. Hal ini menyebabkan lemahnya pengawasan mutu dan keterbatasan pendampingan profesional bagi guru dan kepala sekolah (Bush, 2020).

Dengan demikian, karakteristik wilayah kepulauan menciptakan konteks pendidikan yang kompleks dan menantang. Tantangan tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan pendekatan teknis atau penambahan sumber daya, tetapi memerlukan strategi manajemen pendidikan yang adaptif dan kontekstual.

2.3 Manajemen Pendidikan Berkelanjutan

Manajemen pendidikan berkelanjutan merupakan pendekatan pengelolaan pendidikan yang menekankan keseimbangan antara pencapaian tujuan jangka pendek dan keberlanjutan sistem pendidikan dalam jangka panjang. Konsep keberlanjutan dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan (UNESCO, 2017).

Dalam perspektif manajemen, keberlanjutan pendidikan dicapai melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan sistem yang mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Manajemen pendidikan berkelanjutan menuntut perencanaan strategis yang mempertimbangkan risiko, ketidakpastian, dan dinamika lingkungan eksternal (Wheelen et al., 2018).

Di wilayah kepulauan, manajemen pendidikan berkelanjutan menjadi sangat relevan karena keterbatasan sumber daya dan tingginya tingkat kerentanan sistem pendidikan. Optimalisasi sumber daya lokal, seperti pemanfaatan potensi masyarakat dan kearifan lokal, menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan layanan pendidikan (Tilaar, 2019). Pendekatan ini sejalan dengan konsep manajemen berbasis komunitas yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan pendidikan.

Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan sekolah menjadi elemen kunci dalam manajemen pendidikan berkelanjutan. Sekolah perlu memiliki sistem manajemen yang kuat, kepemimpinan yang visioner, serta budaya

organisasi yang mendukung inovasi dan pembelajaran berkelanjutan (Fullan, 2016). Kapasitas kelembagaan yang kuat memungkinkan sekolah untuk bertahan dan berkembang meskipun menghadapi keterbatasan eksternal.

Kolaborasi multipihak juga merupakan pilar penting dalam manajemen pendidikan berkelanjutan. Pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di wilayah kepulauan. Kolaborasi ini dapat berbentuk dukungan pendanaan, penyediaan fasilitas, maupun pengembangan program inovatif berbasis kebutuhan lokal (OECD, 2018).

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi strategi pendukung manajemen pendidikan berkelanjutan. Teknologi digital memungkinkan pembelajaran jarak jauh, supervisi daring, serta pengelolaan administrasi pendidikan yang lebih efisien. Bagi wilayah kepulauan, teknologi digital dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan (Means et al., 2020).

Secara keseluruhan, manajemen pendidikan berkelanjutan menawarkan kerangka strategis yang relevan untuk menjawab tantangan pendidikan di wilayah kepulauan. Pendekatan ini menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan manajerial, dengan tujuan memastikan bahwa pendidikan tetap dapat diakses dan bermutu bagi generasi sekarang dan mendatang.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan literature review naratif-terstruktur (narrative structured literature review). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis empiris, melainkan untuk menggali, mensintesis, dan mengintegrasikan berbagai temuan konseptual dan empiris yang berkaitan dengan strategi manajemen pendidikan di wilayah kepulauan. Literature review naratif-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengkaji literatur secara sistematis namun tetap fleksibel dalam mengembangkan analisis konseptual yang mendalam (Grant & Booth, 2009).

Pendekatan ini relevan untuk topik manajemen pendidikan di wilayah kepulauan yang bersifat kompleks, kontekstual, dan multidimensional. Banyak isu yang muncul tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan memerlukan pemahaman komprehensif terhadap konteks geografis, sosial, kebijakan, dan kelembagaan. Oleh karena itu, literature review naratif-terstruktur dipandang mampu menjembatani keterbatasan pendekatan kuantitatif yang sering kali kurang sensitif terhadap konteks wilayah khusus (Snyder, 2019).

3.2 Sumber Data dan Strategi Penelusuran Literatur

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi yang membahas topik manajemen pendidikan, pendidikan wilayah kepulauan, pendidikan daerah terpencil, serta manajemen pendidikan berkelanjutan. Penelusuran literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah, antara lain Google Scholar, Scopus, ERIC, dan portal jurnal nasional terakreditasi.

Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran literatur meliputi kombinasi istilah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti *manajemen pendidikan*, *educational management*, *island education*, *education in remote areas*, *rural and remote education*, dan *sustainable education management*. Penggunaan kata kunci ganda bertujuan untuk memperluas cakupan literatur sekaligus memastikan relevansi dengan konteks pendidikan di wilayah kepulauan.

Untuk menjaga kualitas sumber, literatur yang dipilih difokuskan pada artikel jurnal yang telah melalui proses peer-review, buku akademik, serta laporan resmi dari lembaga internasional dan nasional yang kredibel. Rentang waktu publikasi literatur difokuskan pada sepuluh hingga lima belas tahun terakhir, guna memastikan bahwa temuan dan konsep yang dikaji masih relevan dengan dinamika pendidikan kontemporer (Booth et al., 2016).

3.3 Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Dalam proses seleksi literatur, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas. Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel yang membahas manajemen pendidikan atau kepemimpinan pendidikan; (2) literatur yang

secara eksplisit mengkaji pendidikan di wilayah kepulauan, daerah terpencil, atau wilayah dengan karakteristik geografis khusus; dan (3) publikasi yang menyediakan analisis konseptual atau temuan empiris yang relevan dengan strategi pengelolaan pendidikan.

Sebaliknya, kriteria eksklusi meliputi: (1) artikel yang hanya membahas aspek pedagogis tanpa keterkaitan dengan manajemen atau tata kelola pendidikan; (2) publikasi non-akademik yang tidak melalui proses penelaahan sejawat; serta (3) literatur yang konteksnya tidak relevan dengan pendidikan formal atau sistem pendidikan publik. Penerapan kriteria ini bertujuan untuk memastikan fokus kajian tetap terjaga dan kualitas analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Tranfield et al., 2003).

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (thematic analysis), yaitu teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan pola tema yang muncul dari literatur yang dikaji. Analisis tematik dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menstrukturkan berbagai temuan yang beragam ke dalam tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian (Braun & Clarke, 2006).

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah pembacaan mendalam terhadap seluruh literatur terpilih untuk memperoleh pemahaman umum. Tahap kedua adalah pengkodean awal, yaitu mengidentifikasi konsep, isu, dan temuan utama yang berkaitan dengan tantangan manajemen pendidikan, strategi adaptasi, dan model pengelolaan berkelanjutan. Tahap ketiga adalah pengelompokan kode ke dalam tema-tema utama yang mencerminkan pola konseptual dalam literatur. Tahap terakhir adalah interpretasi tematik untuk mengaitkan temuan dengan kerangka teoretis manajemen pendidikan dan konteks wilayah kepulauan.

3.5 Validitas dan Keandalan Kajian

Untuk meningkatkan validitas dan keandalan hasil kajian, penelitian ini menerapkan beberapa strategi. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai jenis literatur, termasuk artikel jurnal, buku akademik, dan laporan kebijakan. Kedua, transparansi proses penelusuran dan seleksi literatur dijaga dengan mendeskripsikan secara rinci basis data, kata kunci, serta kriteria inklusi dan eksklusi yang digunakan (Snyder, 2019).

Selain itu, konsistensi analisis dijaga dengan menggunakan kerangka konseptual yang jelas dalam menginterpretasikan temuan. Dengan demikian, hasil kajian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan reflektif terhadap konteks manajemen pendidikan di wilayah kepulauan.

3.6 Keterbatasan Penelitian

Meskipun literature review naratif-terstruktur memberikan pemahaman yang komprehensif, pendekatan ini memiliki keterbatasan. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer sehingga temuan sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan literatur yang tersedia. Selain itu, kemungkinan adanya bias publikasi tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun demikian, keterbatasan ini diminimalkan melalui pemilihan sumber yang kredibel dan analisis tematik yang sistematis.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Tantangan Manajemen Pendidikan di Wilayah Kepulauan

4.1.1 Keterbatasan Akses Fisik sebagai Hambatan Struktural

Hasil kajian literatur secara konsisten menunjukkan bahwa keterbatasan akses fisik merupakan tantangan fundamental dalam manajemen pendidikan di wilayah kepulauan. Kondisi geografis yang terfragmentasi menyebabkan sekolah-sekolah berada dalam jarak yang berjauhan dan sering kali terisolasi dari pusat administrasi pendidikan. Ketergantungan pada transportasi laut yang tidak menentu akibat cuaca memperparah kesenjangan akses pendidikan, baik bagi peserta didik, guru, maupun tenaga kependidikan.

Dari perspektif manajemen pendidikan, keterbatasan akses fisik tidak hanya berdampak pada kehadiran siswa, tetapi juga memengaruhi efektivitas perencanaan dan pengawasan pendidikan. Kegiatan supervisi akademik dan manajerial menjadi tidak rutin, sehingga kualitas pembelajaran sulit dipantau secara berkelanjutan. Hal ini

menunjukkan bahwa tantangan geografis bersifat sistemik dan memengaruhi seluruh fungsi manajemen pendidikan, mulai dari perencanaan hingga pengendalian.

4.1.2 Stabilitas dan Distribusi Tenaga Pendidik

Temuan literatur juga menunjukkan bahwa rendahnya stabilitas tenaga pendidik menjadi masalah kronis di wilayah kepulauan. Banyak guru ditempatkan secara administratif, tetapi tidak bertahan lama karena keterbatasan fasilitas hidup, akses layanan kesehatan, dan peluang pengembangan karier. Tingginya tingkat rotasi guru berdampak pada terputusnya kontinuitas pembelajaran dan lemahnya hubungan pedagogis antara guru dan peserta didik.

Dalam kerangka manajemen sumber daya manusia pendidikan, kondisi ini mencerminkan kegagalan sistem retensi tenaga pendidik. Kebijakan penempatan guru yang bersifat administratif tanpa dukungan manajerial yang memadai menyebabkan wilayah kepulauan menjadi “daerah transit”, bukan ruang pengabdian jangka panjang. Akibatnya, sekolah sulit membangun budaya organisasi dan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

4.1.3 Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Keterbatasan sarana dan prasarana merupakan tantangan lain yang dominan dalam manajemen pendidikan di wilayah kepulauan. Banyak sekolah masih mengalami kekurangan ruang kelas layak, laboratorium, perpustakaan, serta akses teknologi informasi. Keterbatasan ini tidak hanya menghambat proses pembelajaran, tetapi juga membatasi ruang inovasi manajerial sekolah.

Dari sudut pandang manajemen strategis, keterbatasan sarana prasarana mencerminkan lemahnya integrasi antara perencanaan pendidikan dan kebijakan pembangunan wilayah. Investasi pendidikan sering kali tidak disesuaikan dengan karakteristik geografis kepulauan, sehingga solusi yang diterapkan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.

4.1.4 Lemahnya Koordinasi dan Tata Kelola Pendidikan

Literatur juga mengidentifikasi lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan sebagai tantangan manajerial yang signifikan. Hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat sering kali berjalan secara sektoral. Kurangnya sinergi ini menghambat efektivitas kebijakan dan implementasi program pendidikan.

Dalam perspektif tata kelola pendidikan, kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pendidikan di wilayah kepulauan bukan semata persoalan teknis, tetapi juga persoalan institusional. Tanpa koordinasi yang kuat, berbagai inisiatif pendidikan cenderung berjalan sendiri-sendiri dan tidak memberikan dampak sistemik.

4.2 Adaptasi Strategi Manajemen Pendidikan di Wilayah Kepulauan

4.2.1 Fleksibilitas Perencanaan sebagai Strategi Adaptif

Hasil kajian menunjukkan bahwa fleksibilitas perencanaan merupakan strategi adaptasi utama dalam manajemen pendidikan di wilayah kepulauan. Perencanaan pendidikan tidak dapat disusun secara kaku dan seragam, tetapi harus mempertimbangkan dinamika lokal seperti cuaca, akses transportasi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Fleksibilitas perencanaan tercermin dalam penyesuaian kalender akademik, pengaturan jadwal pembelajaran, serta penetapan prioritas program sekolah. Pendekatan ini sejalan dengan teori manajemen kontingensi yang menekankan bahwa efektivitas organisasi ditentukan oleh kesesuaian antara strategi dan lingkungan.

4.2.2 Penguatan Peran Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Strategis

Literatur menunjukkan bahwa kepala sekolah memegang peran sentral dalam keberhasilan adaptasi manajemen pendidikan di wilayah kepulauan. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin strategis yang mampu mengelola keterbatasan dan membangun inovasi lokal.

Kepemimpinan kepala sekolah yang visioner memungkinkan sekolah untuk tetap berfungsi secara efektif meskipun berada dalam kondisi keterbatasan. Kepala sekolah yang adaptif mampu mengoptimalkan sumber daya lokal, membangun jejaring dengan masyarakat, dan menciptakan budaya sekolah yang resilien. Temuan ini memperkuat teori kepemimpinan transformasional dalam konteks pendidikan wilayah khusus.

4.2.3 Pemanfaatan Teknologi Digital sebagai Solusi Manajerial

Adaptasi manajemen pendidikan di wilayah kepulauan juga ditandai oleh meningkatnya pemanfaatan teknologi digital. Teknologi digital digunakan tidak hanya untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi juga untuk administrasi pendidikan, supervisi daring, dan pengembangan profesional guru.

Pemanfaatan teknologi digital menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan akses fisik. Namun, literatur menegaskan bahwa teknologi bukan solusi tunggal. Keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, dan infrastruktur pendukung. Tanpa manajemen perubahan yang baik, digitalisasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan.

4.2.4 Inovasi Manajerial Berbasis Kearifan Lokal

Selain teknologi, adaptasi strategi manajemen pendidikan juga dilakukan melalui inovasi berbasis kearifan lokal. Sekolah-sekolah di wilayah kepulauan banyak mengembangkan pendekatan pembelajaran dan pengelolaan sekolah yang selaras dengan budaya dan nilai masyarakat setempat.

Inovasi berbasis kearifan lokal memperkuat legitimasi sosial sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam perspektif manajemen pendidikan, pendekatan ini menunjukkan bahwa adaptasi strategis tidak selalu berbasis teknologi tinggi, tetapi dapat bersumber dari pemanfaatan nilai-nilai lokal secara kreatif dan kontekstual.

4.3 Model Pengelolaan Pendidikan Berkelanjutan di Wilayah Kepulauan

4.3.1 Manajemen Pendidikan Berbasis Komunitas

Model pengelolaan pendidikan berkelanjutan di wilayah kepulauan menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Manajemen berbasis komunitas memungkinkan sekolah untuk memperoleh dukungan sosial, material, dan kultural dari masyarakat sekitar.

Literatur menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat meningkatkan rasa memiliki terhadap sekolah dan memperkuat keberlanjutan layanan pendidikan. Dalam konteks wilayah kepulauan, di mana dukungan pemerintah sering kali terbatas, peran komunitas menjadi sangat strategis.

4.3.2 Kolaborasi Multipihak sebagai Pilar Keberlanjutan

Keberlanjutan manajemen pendidikan di wilayah kepulauan juga ditopang oleh kolaborasi multipihak. Pemerintah, sekolah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah perlu membangun kemitraan yang saling melengkapi.

Kolaborasi multipihak memungkinkan mobilisasi sumber daya yang lebih luas dan berkelanjutan. Dalam kerangka tata kelola pendidikan modern, pendekatan ini sejalan dengan konsep governance yang menekankan peran jejaring dan kemitraan dalam penyelenggaraan layanan publik.

4.3.3 Penguatan Kapasitas Lokal dan Kelembagaan Sekolah

Penguatan kapasitas lokal menjadi fondasi utama model pengelolaan pendidikan berkelanjutan. Sekolah perlu memiliki kapasitas manajerial yang memadai, termasuk kemampuan perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi kinerja.

Literatur menegaskan bahwa keberlanjutan pendidikan tidak dapat bergantung pada intervensi eksternal semata. Tanpa penguatan kapasitas internal, sekolah di wilayah kepulauan akan tetap rentan terhadap perubahan kebijakan dan keterbatasan sumber daya.

4.3.4 Integrasi Keberlanjutan dalam Kebijakan Pendidikan

Model pengelolaan berkelanjutan juga menuntut integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan pendidikan. Kebijakan yang bersifat jangka pendek dan proyek oriented cenderung tidak memberikan dampak jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan di wilayah kepulauan perlu dirancang secara sistemik dan berorientasi pada penguatan kapasitas jangka panjang.

Integrasi ini mencakup aspek pendanaan berkelanjutan, pengembangan sumber daya manusia, serta sistem monitoring dan evaluasi yang adaptif. Dengan demikian, pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan.

4.4 Sintesis Pembahasan: Kerangka Strategi Manajemen Pendidikan Kepulauan

Berdasarkan hasil dan diskusi, dapat disintesis bahwa strategi manajemen pendidikan di wilayah kepulauan harus dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu adaptasi kontekstual, kepemimpinan strategis, dan keberlanjutan kelembagaan. Ketiga pilar ini saling terkait dan membentuk sistem manajemen pendidikan yang resilien.

Sintesis ini mempertegas bahwa tantangan pendidikan di wilayah kepulauan bukan semata-mata persoalan geografis, melainkan persoalan manajerial dan kelembagaan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bersifat strategis, sistemik, dan berorientasi jangka panjang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan di wilayah kepulauan menghadapi tantangan yang bersifat struktural, kontekstual, dan sistemik. Tantangan utama meliputi keterbatasan akses fisik akibat kondisi geografis yang terfragmentasi, rendahnya stabilitas dan pemerataan tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta lemahnya koordinasi dan tata kelola antar pemangku kepentingan pendidikan. Tantangan-tantangan tersebut saling terkait dan berdampak langsung pada efektivitas penyelenggaraan pendidikan serta mutu layanan pendidikan di wilayah kepulauan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan manajemen pendidikan yang bersifat seragam dan sentralistik belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pendidikan di wilayah kepulauan. Oleh karena itu, adaptasi strategi manajemen pendidikan menjadi keharusan. Adaptasi tersebut diwujudkan melalui fleksibilitas perencanaan pendidikan yang menyesuaikan dengan kondisi lokal, penguatan peran kepala sekolah sebagai pemimpin strategis yang mampu mengelola keterbatasan dan mendorong inovasi, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pendukung pembelajaran dan pengelolaan administrasi pendidikan. Adaptasi manajerial ini terbukti penting dalam meningkatkan daya tahan dan efektivitas sistem pendidikan di tengah keterbatasan wilayah kepulauan. Lebih lanjut, kajian ini menegaskan bahwa keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di wilayah kepulauan hanya dapat dicapai melalui model pengelolaan pendidikan yang berorientasi jangka panjang. Model pengelolaan pendidikan berkelanjutan menekankan manajemen berbasis komunitas, kolaborasi multipihak antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, serta penguatan kapasitas lokal dan kelembagaan sekolah. Pendekatan ini memungkinkan pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya bertahan dalam kondisi keterbatasan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan dan kontekstual. Secara keseluruhan, strategi manajemen pendidikan di wilayah kepulauan perlu dibangun atas dasar adaptasi terhadap konteks geografis dan sosial, kepemimpinan pendidikan yang kuat, serta tata kelola pendidikan yang berkelanjutan. Kesimpulan ini menegaskan bahwa peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan di wilayah kepulauan tidak hanya bergantung pada penambahan sumber daya, tetapi terutama pada kualitas strategi manajemen pendidikan yang diterapkan.

Referensi

1. Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review* (2nd ed.). SAGE Publications.
2. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
3. BPS-Statistics Indonesia. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. Badan Pusat Statistik.
4. Bush, T. (2020). *Theories of educational leadership and management* (5th ed.). SAGE Publications.
5. Bush, T., & Glover, D. (2014). School leadership models: What do we know? *School Leadership & Management*, 34(5), 553–571.
6. Fullan, M. (2016). *The new meaning of educational change* (5th ed.). Teachers College Press.
7. Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal*, 26(2), 91–108. <https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>
8. Kemendikbudristek. (2022). *Laporan Kinerja 2022*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
9. Kemendikbudristek. (n.d.). *Rapor Pendidikan* (Platform). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
10. Kemendikbudristek. (n.d.). *Rapor Pendidikan Publik: Rapor Pendidikan Indonesia* (Platform/produk). Pusat Asesmen Pendidikan—Kemendikbudristek.
11. Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5–22. <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077>
12. Means, B., Bakia, M., & Murphy, R. (2020). *Learning online: What research tells us about whether, when and how*. Routledge.
13. OECD. (2018). *Responsive school systems: Connecting facilities, sectors and programme* (Effective School Resource Use). OECD Publishing.
14. Robbins, S. P., & Coulter, M. (2017). *Management* (14th ed.). Pearson.
15. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
16. Tilaar, H. A. R. (2019). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebudayaan*. Kompas Gramedia.
17. Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
18. Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>

19. UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning objectives*. UNESCO Publishing.
20. Wheelen, T. L., Hunger, J. D., Hoffman, A. N., & Bamford, C. E. (2018). *Strategic management and business policy: Globalization, innovation, and sustainability* (15th ed.). Pearson.